PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD TRIWULAN III TAHUN 2022

KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, kondisi Triwulan II ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Evaluasi dan pengendalian hasil pelaksanaan RKPD Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2022 ini merupakan salah satu dari penunjang urusan yang terdiri dari 6 program, 10 kegiatan dan 25 sub kegiatan. Evaluasi hasil RKPD ini merupakan kompilasi dari Evaluasi Hasil Rencana Kerja seluruh Program dan Kegiatan yang ada di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan didaerah.

Tapan, 06 Oktober 2022

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

AFLIZEN, S.Sos
Nip. 19720605 199303 1 005

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dan dilaksanakan melalui APBD tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 137 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi RKPD triwulan II Tahun Anggaran 2022 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2022.

1.1 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 125 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 137 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evalusi Hasil RKPD Tahun 2022 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2022, guna :

a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program / kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022.

b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2022 dan RPJMD Tahun 2021-2026.

c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD tahun 2022 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2022.

d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2022.

e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD tahun 2022, yang merupakan tahun ke-2 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.

f. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

1.3. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksananaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan terget rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja Evaluasi Hasil RKPD

No	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	91%≤100%
2	Tinggi	T	76%≤90%
3	Sedang	S	66%≤75%
4	Rendah	R	51% ≤65 %
5	Sangat Rendah	SR	≤50%

Sumber : Permendagri 86/2017

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN RKPD

A. URUSAN PEMERINTAHAN

1. Kewilayahan

Urusan ini diselenggarakan oleh kecamatan Basa Ampek Balai Tapan melalui 6 program, 10 Kegiatan dan 25 sub kegiatan, dengan anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 1.520.305.100 Sampai dengan akhir Triwulan III, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 1.198.110.964,- dengan capaian kinerja dari seluruh program 87,93 (Tinggi) dan capaian anggaran 78,81 % (Tinggi).

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1.1. Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Triwulan III Tahun 2022

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan III Tahun 2022 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Triwulan III Tahun 2022

No	Urusan	Anggaran APBD 2022	Realisasi Anggaran s/d Triwulan III	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
				Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
Urusan Pemerintahan							
1	Kewilayahan	1.520.305.100	1.198.110.964,-	87,93	T	78,81	T

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan rata-rata pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran sampai tanggal 30 September 2022 Kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sangat beragam, dan masih memiliki interval penilaian realisasi kinerjanya Tinggi (T) dan Tinggi (T). Hasil pengendalian dan evaluasi memperlihatkan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu, antara lain :

a. Karena adanya perubahan nomeklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga realisasi keuangan dan kinerja menjadi terlambat dan terkendala.

b. Lebih dioptimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, sehingga pengendalian kinerjanya dapat dicapai secara maksimal.

3.2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan III, Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

a. Camat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam

pelaksanaan Renja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dapat cepat diketahui.

b. Camat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan agar selalu meningkatkan perhatian terhadap data capaian kinerja setiap triwulan sebagai bahan analisis pengambilan kebijakan percepatan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

c. Realisasi dana Covid-19 yang telah terealisasi secara sempurna sehingga target dilapang telah tercapai secara sempurna.

LAMPIRAN

TABEL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
TAHUN TAHUN 2022

KONDISI TRIWULAN III TAHUN 2022

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TRIWULAN III (JULI - SEPTEMBER) TAHUN 2022
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

No	Basaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja Renstra PD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 13/8*100		16
7		7	KEWILAYAHAN																						
		7 01	KECAMATAN		1,128	1,843,420,000	932	1,572,579,935	1,127	1,520,305,100	260	271,773,644	298	492,465,734	433	433,871,586			991	1,198,110,964	991	1,198,110,964	87.93	78.81	
1	Meningkatnya afektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi dan keuangan	7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	567	1,689,900,000	596	1,429,521,935	566	1,362,488,350	127	247,400,644	220	446,260,834	143	387,334,836	-	-	490	1,080,996,314	490	1,080,996,314	86.57	79.34	Kec. BAB Tapan
		7 01 012.01	Perencanaan , penggangaran, an evaluasi kinerja perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencaan dan evaluasi kinerja	59	10,000,000	59	8,564,300	59	14,361,300	18	1,333,000	19	913,000	13	4,340,000	-	-	50	6,586,000	50	6,586,000	84.75	45.86	Kec. BAB Tapan
		7 01 012.0 01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dok	5,000,000	6 dok	5,655,300	6 dok	7,355,300	5	741,000	1	633,000	1	3,340,000			7	4,714,000	7	4,714,000	116.67	64.09	Kec. BAB Tapan
		7 01 012.0 07	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	53 lap	5,000,000	53 lap	2,909,000	53 lap	7,006,000	13	592,000	18	280,000	12	1,000,000			43	1,872,000	43	1,872,000	81.13	26.72	Kec. BAB Tapan
		7 01 012.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Tersediannya administrasi keuangan perangka	144	1,345,000,000	144	1,156,616,635	144	1,054,062,050	36	161,546,896	100	392,566,550	53	321,688,156			189	875,801,602	189	875,801,602	131.25	83.09	Kec. BAB Tapan

		7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	132	ob	1,300,000,000	132	ob	1,102,984,895	132	ob	984,611,693	33	151,900,529	97	378,997,514	50	308,119,120			180	839,017,163	180	839,017,163	136.36	85.21	Kec. BAB Tapan
		7	01	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	dokumen	45,000,000	12	dokumen	53,631,740	12	dokumen	69,450,357	3	9,646,367	3	13,569,036	3	13,569,036			9	36,784,439	9	36,784,439	75.00	52.97	Kec. BAB Tapan
		7	01	01	2.06		Administrasi Umum perangkat daerah	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah	324		158,400,000	353		118,570,030	323		160,328,710	60	56,975,600	91	26,994,500	70	29,170,500			221	113,140,600	221	113,140,600	68.42	70.57	Kec. BAB Tapan
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6	paket	3,000,000	6	bln	2,306,480	6	bln	2,312,640	2	390,000	1	502,000	1	1,085,000			4	1,977,000	4	1,977,000	66.67	85.49	Kec. BAB Tapan
		7	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6	paket	40,000,000	5	paket	17,291,900	5	paket	33,596,000	5	33,540,000	-	-					5	33,540,000	5	33,540,000	100.00	99.83	Kec. BAB Tapan
		7	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	paket	22,000,000	12	paket	20,252,050	12	paket	22,638,570	3	4,655,600	3	7,601,000	3	5,758,000			9	18,014,600	9	18,014,600	75.00	79.57	Kec. BAB Tapan

		7	01	01	2.04	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	paket	6,000,000	12	paket	9,023,600	12	paket	8,819,000	3	1,384,000	4	1,904,000	2	3,580,000			9	6,868,000	9	6,868,000	75.00	77.88	Kec. BAB Tapan
		7	01	01	2.04	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	dokumen	2,400,000	12	dokumen	1,800,000	12	dokumen	1,800,000	-	-	5	500,000	3	300,000			8	800,000	8	800,000	66.67	44.44	Kec BAB Tapan
		7	01	01	2.04	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	6	laporan	5,000,000	6	laporan	10,046,000	6	laporan	2,750,000	-	-	4	687,500	1	1,072,500			5	1,760,000	5	1,760,000	83.33	64.00	Kec BAB Tapan
		7	01	01	2.04	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	270	dokumen	80,000,000	300	dokumen	57,850,000	270	dokumen	88,412,500	47	17,006,000	74	15,800,000	60	17,375,000			181	50,181,000	181	50,181,000	67.04	56.76	Kec BAB Tapan
		7	01	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Tersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	24		88,500,000	24		85,895,000	24		68,395,000	6	13,673,898	7	19,201,534	4	19,412,430			17	52,287,862	17	52,287,862	70.83	76.45	
		7	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	8,500,000	12	oran	8,395,000	12	laporan	8,395,000	3	1,673,898	4	1,201,534	2	1,412,430			9	4,287,862	9	4,287,862	75.00	51.08	**Kec. BAB Tapan**
		7	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	80,000,000	12	oran	77,500,000	12	laporan	60,000,000	3	12,000,000	3	18,000,000	2	18,000,000			8	48,000,000	8	48,000,000	66.67	80.00	

		7	01	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya operasional pemeliharaan barang milik daerah	16		88,000,000	16		59,875,970	16		65,341,290	7	13,871,250	3	6,585,250	3	12,723,750			13	33,180,250	13	33,180,250	81.25	50.78	
		7	01	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipeliharaa dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4	unit	40,000,000	4	unit	37,460,970	4	unit	48,129,290	1	12,236,250	2	6,225,250	1	6,675,750			4	25,137,250	4	25,137,250	100.00	52.23	
		7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipeliharaa	10	unit	8,000,000	10	unit	5,200,000	10	unit	5,200,000	6	1,635,000	-	-	2	1,385,000			8	3,020,000	8	3,020,000	80.00	58.08	
		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipeliharaa/direhabilitasi	2	unit	40,000,000	2	unit	17,215,000	2	unit	12,012,000	-	-	1	360,000		4,663,000			1	5,023,000	1	5,023,000	50.00	41.82	
2	**Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan kelancaran pelayanan**	**7**	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Tingkat kepuasan terhadap pelayanan kecamatan**	**262**		**18,520,000**	**37**		**79,635,000**	**262**		**89,239,250**	**95**	**8,862,500**	**20**	**28,639,650**	**64**	**21,462,500**			**179**	**58,964,650**	**179**	**58,964,650**	**68.32**	66.07	**Kec. BAB Tapan**
		7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**262**		**18,520,000**	**37**		**79,635,000**	**262**		**89,239,250**	**95**	**8,862,500**	**20**	**28,639,650**	**64**	**21,462,500**			**179**	**58,964,650**	**179**	**58,964,650**	**68.32**	66.07	

		7	01	02	2 0	01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	-	-	-	10	Dokumen	3,000,000	0		0.00	-	-				-			-	-	-	-	-		
		7	01	02	2 0	02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	250	Laporan	3,520,000	15	Laporan	1,960,000	250	Laporan	3,520,000	92	-	15		62	1,100,000			169	1,100,000	169	1,100,000	67.60	31.25	
		7	01	02	2 0	03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan keuangan lain yang dilimpahkan	12	lapo ran	15,000,000	12	lapo ran	74,675,000	12	lapo ran	85,719,250	3	8,862,500	5	28,639,650	2	20,362,500			10	57,864,650	10	57,864,650	83.33	67.50	
4		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan/antibum yang dapat diselesaikan	7		10,000,000	7		4,850,000	7		4,137,500	-	-	3	2,109,000		-	-		3	2,109,000	3	2,109,000	42.86	50.97	Kec BAB Tapan
		7	01	04	2.01		Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	7		10,000,000	7		4,850,000	7		4,137,500	-	-	3	2,109,000					3	2,109,000	3	2,109,000	42.86	50.97	

		7	01	04	2 0	01	Sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di willayah kecamatan	Jumlah laporan sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal diwilayah kecamatan	4	lapo ran	5,000,000	4	lapo ran	2,000,000	4	lap ora n	2,000,000	-		-								-	-	-	-	-	-		
		7	01	04	2 0	02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh	3	lapo ran	5,000,000	3	lapo ran	2,850,000	3	lap ora n	2,137,500	-		-	3	2,109,000					3	2,109,000	3	2,109,000	100.00	98.67		
5		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penugasan terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan	100		30,000,000	100		16,318,500	100		16,030,000	0		-	0	-	180	16,001,500			180	16,001,500	180	16,001,500	180.00	99.82		Kec. BAB Tapan
		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala Daerah	Terselenggaranya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	100	orang	30,000,000	100	orang	16,318,500	100	kali	16,030,000	0		-		-	180	16,001,500			180	16,001,500	180	16,001,500	180.00	99.82		
		7	01	05	2 0	03	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa	100	orang	30,000,000	100	orang	16,318,500	100	orar	16,030,000	-		-			180	16,001,500			180	16,001,500	180	16,001,500	180.00	99.82		

5	Optimalisasi pengelolaan pemerintahan pemberdayaan masyarakat Nagari	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terwujudnya usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	22		75,000,000	22		29,729,500	22		38,347,500	13	12,160,500	5	14,756,250	1	3,417,750			19	30,334,500	19	30,334,500	86.36	79.10	Kec. BAB Tapan
		7	01	03	2	01	Koordinasi Kegatan pemberdayaan Desa	Peningkatan efektifitas kegatan pemberdayaan masyarakat	22		75,000,000	22		29,729,500	22		38,347,500	13	12,160,500	5	14,756,250	1	3,417,750	-	-	19	30,334,500	19	30,334,500	86.36	79.10	Kec. BAB Tapan
		7	01	03	2	0	01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	10	lembaga kemasyarakatan	10,000,000	10	lembaga kemasyarakatan	7,652,000	10	lembaga kemasyarakatan	10,785,000	10	9,649,500	-	-		-			10	9,649,500	10	9,649,500	100.00	89.47	Kec. BAB Tapan
		7	01	03	2	0	03	Peningkatan efektifitas kegatan pemberdayaan masarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	12	laporan	65,000,000	12	laporan	22,077,500	12	laporan	27,562,500	3	2,511,000	5	14,756,250	1	3,417,750	-	-	9	20,685,000	9	20,685,000	75.00		Kec. BAB Tapan
6		7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik	170	dokumen	20,000,000	170	dokumen	12,525,000	170	dokumen	10,062,500	25	3,350,000	50	700,000	45	5,655,000	0		120	9,705,000	120	9,705,000	70.59	96.45	Kec. BAB Tapan

		7	01	06	2.01	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa (Nagari)	170	dokumen	20,000,000	170	dokumen	12,525,000	170	dokumen	10,062,500	25	3,350,000	50	700,000	45	5,655,000			120	9,705,000	120	9,705,000	70.59	96.45	
		7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa	170	dokumen	20,000,000	170	dokumen	12,525,000	170	dokumen	10,062,500	25	3,350,000	50	700,000	45	5,655,000			120	9,705,000	120	9,705,000	70.59	96.45	
JUMLAH								**1,128**		**1,843,420,000**	**932**		**1,572,579,935**	**1,127**		**1,520,305,100**	**260**	**271,773,644**	**298**	**492,465,734**	**433**	**433,871,586**	-	-	**991**	**1,198,110,964**	**991**	**1,198,110,964**	**87.93**	**78.81**	
																													Rata-Rata Capaian Kinerja	**87.93**	**78.81**	
																													Peringkat Kinerja	**T**	**T**	

Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikut*)

Ujung Gurun, 06 Oktober 2022

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

AFRIZEN, S.Sos

Nip. 19720605 199303 1 006